

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sudah mengalami perkembangan demokrasi, setidaknya sebanyak tiga kali. Perkembangan demokrasi Pancasila seiring dengan perkembangan kehidupan bangsa dan tantangan yang mengiringinya pada masa itu, sehingga demokrasi kita berkembang silih berganti mulai dari sistem demokrasi liberal dengan kabinet parlementer pada awal kemerdekaan dari tahun 1945-1959, kemudian demokrasi terpimpin pada awal masa Orde Lama dari tahun 1959-1966, dan terakhir demokrasi pancasila dibawah pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966-1998 yang kemudian di reformasi pada tahun 1998 lalu dengan demokrasi pancasila Orde Reformasi.

Demokrasi yang berakar dari budaya bangsa tidak hanya dijalankan dalam pemerintahan, namun juga dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Praktek demokrasi sehari-hari pelaksanaannya masih jauh dari apa yang diharapkan, hal ini dapat kita maklumi dengan alasan Indonesia masih dalam tahap belajar berdemokrasi. Proses belajar ini terhitung mulai dari tahun 1998 saat runtuhnya Orde Baru, dimana pada saat itu demokrasi pancasila dipahami terlalu ketat sehingga menjurus ke arah otoriterisme.

Menurut Udin S.Winataputra, (2002:108) “ethos demokrasi itu tidak diwariskan melainkan dipelajari dan dipahami”. Dari pendapat tersebut tergambar untuk memasyarakatkan demokrasi diperlukan suatu pendidikan

demokrasi yang dapat mengajarkan apa dan bagaimana demokrasi itu dijalankan. Rumusan ini sesuai dengan rumusan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi salah satu dasar negara pada sila kelima pancasila, berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan landasan fundamental dan legitimasi konstitusional tersebut melalui UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah selanjutnya memperluas cakupan makna dan muatannya ke dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang termaktub di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3, Yaitu :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional diatas, maka pendidikan demokrasi sangat penting bagi membina watak warga negara demokratis. Adapun pendidikan demokrasi itu sendiri dipersekolahan diajarkan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang salah satu muatan isinya adalah mengenai pendidikan demokrasi-politik yang didalamnya mengandung konsep-konsep demokrasi. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diartikan sebagai sarana untuk mengembangkan nilai-nilai moral budaya bangsa Indonesia yang merupakan usaha sadar kita untuk membekali anak didik penerus bangsa dengan budi pekerti, pengetahuan dan

kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara dan hubungan antar warga itu sendiri.

Adapun pengertian PKn itu sendiri menurut H.M. Nu'man Sumantri, (2001:31) adalah sebagai berikut:

Pendidikan Kewarganegaraan adalah seleksi adaptasi dari lintas-lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan. Humaniora, teknologi, agama, kegiatan dasar manusia yang diorganisir dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai satu tujuan PIPS-tujuan pendidikan nasional.

Untuk memperkuat pengertian Pendidikan Kewarganegaraan diatas, berikut pendapat Benjamin Barber yang dikutip oleh Fachrul Razi dalam artikel mengenal *Civic Education* di Indonesia diberi label Pendidikan Kewarganegaraan, (Razi,2001), menyatakan hal berikut ini:

Dalam sebuah buku Belajar *Civic Education* dari Amerika, dijelaskan bahwa *Civic Education* adalah pendidikan untuk mengembangkan dan memperkuat dalam atau tentang pemerintahan otonom (*Self Government*). Pemerintah otonom demokratis berarti bahwa warga negara aktif terlibat dalam pemerintahnya sendiri, mereka tidak hanya menerima dikte orang lain atau memenuhi tuntutan orang lain

Dari kedua pengertian Pendidikan Kewarganegaraan diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan mata pelajaran PKn sebagai bagian dari pendidikan umum merupakan ciri budaya dan pola pikir yang tumbuh dan berkembang dari kebutuhan pendidikan nasional, PKn pun merupakan salah satu wahana yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan hidup bersama dalam perbedaan, memberikan pengalaman kepada siswa untuk belajar menjadi warga negara yang baik.

Adapun karakteristik warga negara yang baik menurut (Kosasih Djahiri, 2002:92), adalah sebagai berikut:

Pertama, iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, memiliki nasionalisme (rasa kebangsaan) yang kuat dan mantap. Ketiga, sadar dan mampu membina serta melaksanakan hak dan kewajiban dirinya sebagai manusia, warga masyarakat dan bangsanya. Keempat, taat asas / ketentuan (*rule of law*) dan kelima, demokratis dan partisipatif, aktif-kreatif-positif dalam kebinekaan masyarakat-bangsa-negara madani (*Civil Society*) yang terbuka-mendunia (global) dan modern tanpa melupakan jati diri masyarakat, bangsa dan negaranya.

Untuk mempertegas karakteristik diatas, berikut adalah karakteristik warga negara yang baik menurut Azis Wahab (2001:43-44) yang digambarkan dalam konsep *Civic Education* dibawah ini:

Pembahasan *Civic Education* tidak dapat dipisahkan dari *civic* yang tidak hanya menekankan pada aspek teoritik warga negara dan pemerintahan tetapi sudah meluas kepada persiapan menjadi warga negara dengan pengetahuannya mengenai negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya melalui pelajaran sosial studi atau IPS.

Adapun warga negara yang baik menurut Aim Abdul Karim (1994:136) “warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki tekad, sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpaduan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara”.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki kecintaan kepada negara serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Berkenaan dengan karakteristik yang diuraikan diatas, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik, dimana salah satu isi muatan PKn adalah tentang pelajaran demokrasi. Pembelajaran-pembelajaran konsep demokrasi tersebut tidak hanya diberikan melalui diktat atau

penuturan naratif dari guru untuk memberikan pengetahuan, namun harus dikembangkan dengan berpijak pada paradigma baru belajar tentang demokrasi melalui cara hidup yang demokratis untuk menuju sistem demokrasi yang semakin baik, untuk memperluas dan memperdalam pemahaman dan wawasan mengenai konsep, generalisasi, dan fakta/data.

Pembelajaran PKn harus merupakan kombinasi dari partisipasi. Kooperatif dan usaha untuk mendorong rasa ingin tahu siswa. Oleh karena itu kelas perlu dibangun menjadi miniatur demokrasi, sekolah harus menjalankan antara lain: transparansi dalam segala hal, cara memimpin yang baik kepada sekolah, guru dan orang tua, siswa diajarkan untuk menjadi warga sekolah yang baik, yang nantinya diharapkan dapat menjadi warga Indonesia yang baik.

Bertitik tolak pada uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun dan mengadakan penelitian tentang: **“Kontribusi Konsep Demokrasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Siswa Menjadi Warga Negara Yang Baik”**. (Studi Deskriptif analitis terhadap siswa-siswa SMU Negeri 1 Purwakarta).

B. Rumusan dan Permasalahan

1. Rumusan masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, penulis rumuskan suatu masalah pokok sebagai berikut : “Bagaimana kontribusi konsep demokrasi pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam membina siswa menjadi warga negara yang baik?”

2. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Konsep-konsep demokrasi mana saja pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat memberikan kontribusinya pada proses pembinaan siswa menjadi warga negara yang baik, ditinjau dari segi ruang lingkup (isi materi)?
- b. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran konsep demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang memberikan kontribusinya pada proses pembinaan siswa menjadi warga negara yang baik, ditinjau dari tahapan kognitif?
- c. Bagaimana tingkat kemampuan siswa dalam memahami konsep demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat memberikan kontribusinya pada proses pembinaan siswa menjadi warga negara yang baik?
- d. Apa sajakah kendala yang dihadapi ketika konsep demokrasi dalam kurikulum KTSP di masukan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?
- e. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Bapak/ Ibu dalam menangani kendala yang dihadapi?

C. Definisi Istilah

1. Kontribusi adalah sumbangan, dalam hal ini berarti sumbangan yang diberikan konsep demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membina siswa menjadi warga negara yang baik. Adapun yang dimaksud kontribusi dalam penelitian ini adalah kontribusi secara kualitatif yang dapat memberikan gambaran tentang kecenderungan siswa menjadi warga negara yang baik.
2. Konsep demokrasi adalah sebagai kerangka berfikir dalam melakukan pengaturan umum atas dasar prinsip dari, oleh dan untuk rakyat diterima baik segi ide, norma, sistem sosial maupun sebagai wawasan, sikap, perilaku individual yang secara kontekstual diwujudkan, dipelihara dan dikembangkan, (Winataputra, 2001:52). Konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep yang tertuang dalam kurikulum PKn yang syarat/ kadar demokrasi yang lebih tinggi.
3. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, *socio-cultural*, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang dinamakan oleh pancasila dan UUD 1945.
4. Membina diartikan sebagai membangun, mendirikan, mengusahakan supaya lebih maju. Membina dalam penelitian ini adalah memberikan kecenderungan secara positif.

5. Siswa adalah peserta didik yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. (UUSPN, 2003).
6. Warga negara yang baik adalah warga negara yang patriotik, toleran, loyal terhadap bangsa dan, negara, beragama, demokratis atau yang populer disebut warga negara yang pancasilais, (Nu'man Sumantri, 1976:28). Warga negara yang baik dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa sebagai calon warga negara dengan menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut; beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki rasa nasionalisme, sadar akan hak dan kewajiban, patuh pada peraturan dan berpartisipasi aktif-kreatif-positif dalam kebinekaan masyarakat madani.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu untuk mengkaji :

- a. Konsep-konsep demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang memberikan kontribusinya terhadap pembinaan siswa menjadi warga negara yang baik, ditinjau dari segi ruang lingkup (isi materi).
- b. Pelaksanaan proses pembelajaran konsep demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang memberikan kontribusinya terhadap

pembinaan siswa menjadi warga negara yang baik, ditinjau dari segi tahapan kognitif.

- c. Kemampuan siswa dalam memahami konsep demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- d. kendala yang dihadapi ketika konsep demokrasi dalam kurikulum KTSP termasuk pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- e. upaya yang dilakukan oleh Bapak/ Ibu dalam menangani kendala yang dihadapi.

2. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan konsep demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dipersekolahan dalam membina siswa menjadi warga negara yang baik seperti apa yang diharapkan dalam tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi lembaga pendidikann khususnya sekolah formal dalam memberikan masukan kepada tenaga pengajar khususnya guru-guru PKn mengenai pentingnya konsep demokrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membina siswa menjadi warga negara yang baik.

E. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang didasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang ada pada saat sekarang dan kemudian dianalisis, dengan pendekatan kualitatif.

2. Teknik penelitian

Penelitian ini akan mengungkapkan beberapa hal melalui kegiatan studi observasi, wawancara, studi dokumentasi, studi literatur dan juga pengamatan atau secara langsung ke lapangan serta dengan menggunakan analisis data, sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi merupakan langkah awal untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang sedang diteliti dan dapat memberikan deskripsi mengenai gambaran umum objek yang akan diteliti
- b. Wawancara, yaitu teknik penelitian yang berupa percakapan dengan maksud untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini ditujukan kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan kelas XI.
- c. Studi dokumentasi, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap data yang telah diperoleh. Studi dokumentasi dapat berupa data-data tertulis ataupun berupa

gambar-gambar yang dapat memberikan dukungan, seperti Foto-foto pada saat melakukan penelitian.

- d. Studi literatur, yaitu teknik penelitian dengan mempelajari dan mengkaji buku-buku serta sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- e. Analisis Data, Menurut Nasution (2003:129), dalam penelitian kualitatif analisis data harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh dalam lapangan segera harus dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis. Ada beberapa cara dalam analisis data, diantaranya adalah :
 - a) Reduksi data
 - b) Display data
 - c) Mengambil kesimpulan dan verifikasi

F. Subjek dan Lokasi Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu guru PKn, siswa, kepala SMA Negeri 1 Purwakarta serta perangkat lainnya yang menunjang terhadap proses penelitian,

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Purwakarta yang berlokasi di Jalan Colonel Kornel Singawinata No. 113 Purwakarta 41111 Jawa Barat. Dipilihnya sekolah tersebut karena SMA Negeri 1 Purwakarta merupakan salah satu sekolah unggulan, dan masuk dalam *cluster* pertama SMA di Kota Purwakarta.